

SERTIFIKAT

Kementerian Riset dan Teknologi/
Badan Riset dan Inovasi Nasional



Petikan dari Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional
Nomor: 230/E/KPT/2022

Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode I Tahun 2022

Nama Jurnal Ilmiah

Agroteksos

E-ISSN: 26854368

Penerbit: Universitas Mataram

Ditetapkan sebagai Jurnal Ilmiah

TERAKREDITASI PERINGKAT 4

Akreditasi Berlaku selama 5 (lima) Tahun, yaitu
Volume 30 Nomor 2 Tahun 2020 sampai Volume 35 Nomor 1 Tahun 2025

Jakarta, 30 December 2022

Menteri Riset dan Teknologi/

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional

Republik Indonesia,

Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC, Ph.D., IPU, ASEAN Eng
NIP 196107061987101001

PENENTUAN LOKASI SENTRA INDUSTRI HASIL TEMBAKAU (SIHT) DAN STRATEGI PENGEMBANGANNYA DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

DETERMINING THE LOCATION OF THE TOBACCO PRODUCT INDUSTRY CENTER (SIHT) AND ITS DEVELOPMENT STRATEGY IN WEST LOMBOK REGENCY

L. Sukardi^{1*}, Tajidan¹, Fahrudin¹

¹Fakultas Pertanian Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

*Email penulis korespondensi: lsukardi@unram.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah: (1) menentukan lokasi SIHT prioritas dan (2) merumuskan skenario pengelolaan SIHT, dan (3) mengkaji alternatif badan usaha pengelola SIHT di Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Sentra pengembangan Tembakau Kabupaten Lombok Barat. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, wawancara mendalam, penelusuran dokumen, observasi dan *focus group discussion* (FGD). Selanjutnya untuk menentukan lokasi SIHT prioritas, dilakukan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dengan lima kriteria, yaitu: (1) potensi lahan yang tersedia, (2) ketersediaan SDM, (3) ketersediaan infrastruktur pendukung, (4) ketersediaan utilitas, dan (5) aksesibilitas lokasi. Hasil penelitian: (1) lokasi SIHT menurut skala prioritasnya adalah: Kecamatan Lembar, Gerung, Sekotong, dan Kuripan; (2) skenario pengelolaan SIHT, yaitu: pengembangan usaha di lokasi yang dekat dengan tempat tinggal mereka, mempersiapkan generasi muda untuk merintis dan mengembangkan usaha industri hasil tembakau, kerjasama Pemerintah Daerah dengan perusahaan industri hasil tembakau, dan mendirikan BUMD; dan (3) alternatif badan usaha pengelola SIHT adalah: Bumdes, koperasi atau asosiasi, dan persero. Sebelum dilakukan pengembangan SIHT, direkomendasikan untuk dilakukan kajian lingkungan, melengkapi izin, dan pelatihan SDM.

Kata kunci: lokasi, prioritas, sentra, industri, tembakau

Abstract

The objectives of this research are: (1) determine priority SIHT locations, and (2) formulate SIHT management scenarios, and (3) examine alternative SIHT management business entities in West Lombok Regency. This research was carried out in the Tobacco Development Center area of West Lombok Regency. Data collection was carried out using interview techniques, in-depth interviews, document searches, observations and focus group discussions (FGD). Next, to determine priority SIHT locations, Analytical Hierarchy Process (AHP) was carried out using five criteria, namely: (1) available land potential, (2) availability of human resources, (3) availability of supporting infrastructure, (4) availability of utilities, and (5) location accessibility. Research results: (1) SIHT locations according to priority scale are: Lembar, Gerung, Sekotong and Kuripan Districts; (2) SIHT management scenarios, namely: business development in locations close to where they live, preparing the younger generation to start and develop tobacco products industry businesses, regional government collaboration with tobacco products industry companies, and establishing BUMD; and (3) alternative business entities managing SIHT are: Bumdes, cooperatives or associations, and limited liability companies. Before SIHT development is carried out, it is recommended that environmental studies be carried out, permits are completed and human resource training is carried out.

Key words: location, priority, center, industry, tobacco

PENDAHULUAN

Industri hasil tembakau memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara, tidak hanya sebagai penyedia lapangan kerja tetapi juga sebagai kontributor utama terhadap pendapatan nasional. Selain berkontribusi dalam perekonomian nasional dan daerah, agribisnis tembakau memberikan kontribusi dalam penerimaan negara (Rachmat, 2016; Sukardi, at.al., 2023; Sahri, at.al., 2022), karena dari industri rokok telah menyumbang sekitar Rp 270 triliun dari cukai dan pajak perusahaan rokok. Pendapatan negara yang bersumber dari cukai

tembakau merupakan sumber pendapatan negara terbesar jika dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya. Komoditas tembakau juga merupakan sumber devisa negara dari hasil ekspor tembakau dan sekaligus sebagai komoditas subsidi impor, sehingga dapat menghemat devisa negara (Siregar, 2016; Triono, 2017).

Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) menjadi pusat kegiatan ekonomi yang strategis, memainkan peran sentral dalam rantai produksi tembakau. Penentuan lokasi SIHT adalah keputusan krusial yang memengaruhi efisiensi produksi, distribusi, dan dampak ekonomi secara keseluruhan. Melihat kompleksitas industri hasil tembakau, penempatan SIHT harus mempertimbangkan beberapa aspek, termasuk ketersediaan bahan baku, aksesibilitas pasar, infrastruktur logistik, peraturan pemerintah, dan dampak lingkungan. Pemahaman yang mendalam terhadap dinamika pasar, perubahan regulasi, dan tren konsumen menjadi kunci dalam menentukan lokasi SIHT yang optimal.

Kabupaten Lombok Barat memiliki potensi besar untuk menjadi pusat kegiatan ekonomi yang berfokus pada industri hasil tembakau. Pada tahun 2020 luas areal tanam tembakau di Kabupaten Lombok Barat adalah 283,50 hektar. Luasan tersebut jauh lebih rendah dibandingkan luas areal pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018 tercatat 553,5 hektar, dan tahun 2019 seluas 571,00 hektar (NTB Satu Data, 2021). Secara spasial, potensi areal yang sesuai bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman tembakau di Kabupaten Lombok Barat tersebar di wilayah kecamatan Labuapi, Kecamatan Gerung, Kecamatan Kuripan, Kecamatan Lembar, dan Kecamatan Sekotong (Hijrianto, 2022).

Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) di Lombok Barat menjadi pilihan strategis yang membutuhkan pertimbangan matang dalam penentuan lokasinya. Dengan melibatkan sejumlah faktor, penentuan lokasi SIHT di wilayah ini tidak hanya akan memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga merangsang pembangunan sektor pertanian dan industri. Keberhasilan SIHT di Lombok Barat sangat tergantung pada pemahaman mendalam terhadap karakteristik geografis, ketersediaan lahan, serta kondisi sosial dan ekonomi setempat. Faktor-faktor ini menjadi titik sentral dalam proses penentuan lokasi, yang harus diintegrasikan dengan kebijakan pemerintah, keberlanjutan lingkungan, dan aspirasi masyarakat setempat.

Penelitian ini membahas secara komprehensif mengenai faktor-faktor penentuan lokasi SIHT di Kabupaten Lombok Barat. Dari potensi pertanian tembakau hingga infrastruktur pendukung, akan diuraikan bagaimana pilihan lokasi dapat memperkuat daya saing industri hasil tembakau di tingkat lokal maupun nasional. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang mendalam dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan, termasuk pengusaha, pemerintah daerah, dan masyarakat Kabupaten Lombok Barat, dalam mengambil keputusan yang berkelanjutan untuk pengembangan SIHT di wilayah ini. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) menentukan lokasi SIHT prioritas dan (2) merumuskan skenario pengelolaan SIHT, dan (3) mengkaji alternatif badan usaha pengelola SIHT di Kabupaten Lombok Barat,.

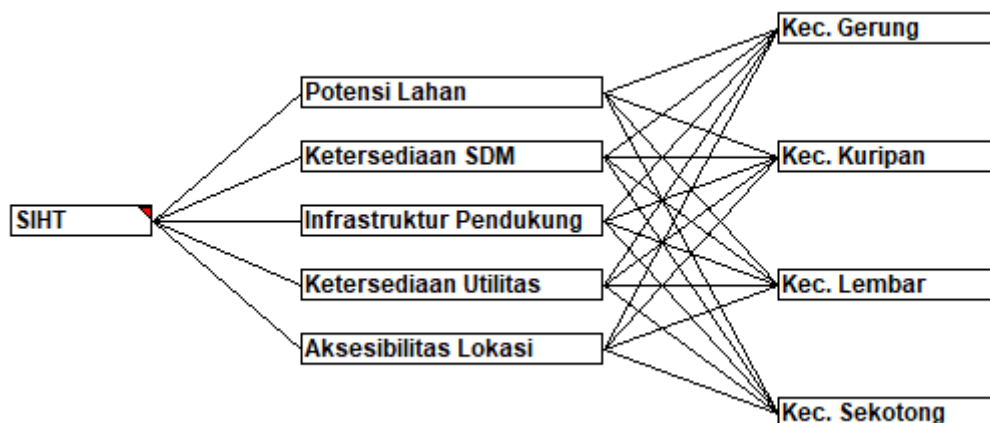
METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Sentra Industri Hasil Tembakau di wilayah Kabupaten Lombok Barat, yaitu di Kecamatan Gerung, Kecamatan Kuripan, Kecamatan Lembar, dan Kecamatan Sekotong. Data yang dikumpulkan berupa data kuantitatif dan data kualitatif berkenaan dengan pengembangan tembakau rakyat.

Pengumpulan data dilakukan dengan Teknik wawancara, wawancara mendalam, penelusuran dokumen, observasi dan *focus group discussion* (FGD). Selanjutnya untuk menentukan lokasi SIHT prioritas, dilakukan Analisis Hirarki Proses (AHP). Ada lima kriteria yang dijadikan dasar untuk penentuan lokasi SIHT, yaitu: (1) Potensi lahan yang tersedia, (2)

Ketersediaan SDM (Petani dan Buruh tani), (3) Ketersediaan infrastruktur pendukung, (4) Ketersediaan utilitas, dan (5) Aksesibilitas Lokasi. Selanjutnya mengenai bobot penilaian untuk masing-masing kriteria berbeda-beda sesuai dengan urgensi dari setiap kriteria, dimana penilaian urgensi/kepentingan masing-masing kriteria dilakukan oleh para pakar yang kompeten.

Selanjutnya secara komprehensif ketlima kriteria ini dijadikan dasar untuk pemilihan lokasi SIHT prioritas, dimana bobot dari masing-masing kriteria ditentukan berdasarkan pertimbangan para pakar yang kompeten. Selengkapnya mengenai rancangan dan struktur Analisis Hirarki Proses (AHP) untuk pemilihan lokasi SIHT Prioritas disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Analisis Hirarki Proses (AHP) Penentuan Lokasi SIHT Prioritas di Kabupaten Lombok Barat

Untuk menghasilkan lokasi SIHT prioritas, diperlukan penilaian pakar melalui teknik wawancara langsung dengan para pakar. Penilaian elemen-elemen yang dilibatkan dalam analisis menggunakan skala perbandingan berpasangan dengan penilaian seperti pada Tabel 1 berikut (Marimin, 2004; Saaty, 1993).

Tabel 1. Skala Perbandingan Berpasangan Dalam Penilaian Elemen Suatu Hirarki

Nilai	Keterangan
1	Kriteria/alternatif yang dibandingkan (mis A & B) “sama penting”
3	Kriteria/alternatif A “sedikit lebih penting” dari B
5	Kriteria/alternatif A “jelas lebih penting” dari B
7	Kriteria/alternatif A “sangat jelas lebih penting” dari B
9	Kriteria/alternatif A “mutlak lebih penting” dari B
2,4,6,8	Apabila ragu-ragu antara dua nilai yang berdekatan

Adapun tahap proses perhitungan Analytic Hierarchy Process (AHP) yaitu sebagai berikut (Purba, et al., 2015; Wati, et al., 2020; Mala, et al., 2018; Syaputra, 2021; Ahdan, et al., 2015; Suseno dan Sutrisno, 2019; Sukardi, et al., 2022).

1. Menyusun hirarki dari permasalahan
 2. Membuat matriks pebandingan berpasangan
 3. Menghitung nilai *eigen value* dan menguji konsistensinya.
- Langkah-langkah yang dilakukan dalam tahap ini adalah :

- a. Menghitung *eigen value* dari setiap baris dengan menggunakan persamaan

$$\lambda_i = \sum_{j=i}^N a_{ij} \frac{W_i}{W_j}$$

- b. Menghitung *eigen vector*. Untuk memperbaiki penilaian harus ditentukan a_{ij} untuk membandingkan objek ke-i dengan ke-j maka perbandingan kebalikannya harus segera ditentukan yaitu a_{ij} , dalam hal ini

$$a_{ij} = \frac{1}{a_{ji}}$$

Dari matriks $A = (a_{ij})$ akan dapat ditentukan sebagai w yang berlaku sebagai *eigen vector*. Untuk memperoleh nilai *eigen vector* dari setiap baris digunakan persamaan

$$(EV)_k = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \frac{a_{kj}}{\sum_{i=1}^N a_{ij}}$$

- c. W_1, W_2, \dots, W_n adalah besaran yang berlaku sebagai *eigen vector*.

Akhirnya harga maksimum dari matriks dapat dihitung dengan persamaan

$$\lambda_{maks} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \lambda_i$$

- d. Melakukan pengujian konsistensi.

Konsistensi dari penilaian dapat diamati dengan cara mengukur derajat konsistensi untuk memperoleh koefisien konsistensi (CI) dengan menggunakan persamaan

$$CI = \frac{\lambda_{maks} - n}{n - 1}$$

Nilai CI yang mendekati nol akan mempunyai tingkatan konsistensi yang baik.

- e. Setelah mengetahui nilai koefisien konsistensi (CI), maka dapat ditentukan konsistensi rasio (CR) dengan menggunakan persamaan :

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

RI adalah bilangan konsistensi random, dimana besarnya disesuaikan dengan ukuran matriks sesuai dengan ketentuan yang dipakai. Jika $CR > 0,1$ maka nilai matriks tersebut tidak konsisten dan harus direvisi, jika konsisten maka dilanjutkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Lahan dan Produksi Tembakau di Kabupaten Lombok Barat

Kabupaten Lombok Barat merupakan penghasil tembakau terbesar ke tiga di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) setelah Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten

Lombok Tengah. Luas lahan tembakau di Kabupaten Lombok Barat rata-rata mencapai 448,8 hektar dan tersebar di hampir semua kecamatan (Dinas Pertanian NTB, 2020).

Tabel 2. Luas Tanam dan Produksi Tembakau Kasturi di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 dan 2020

No	Kecamatan	2018 ¹		2020 ³	
		Luas (ha)	Produksi (ton)	Luas (ha)	Produksi (ton)
1	Gerung	168,00	251,48	60,00	94,20
2	Labuapi	25,00	34,04	20,00	31,56
3	Kediri	10,00	13,03	5,00	7,73
4	Kuripan	3,50	4,97	0	0
5	Narmada	0	0	0	0
6	Lingsar	0	0	0	0
7	Gunungsari	0	0	0	0
8	Batu Layar	0	0	0	0
9	Lembar	185,00	260,91	115,00	172,50
10	Sekotong	162,00	241,47	83,50	125,75
	Jumlah	553,50	805,90	283,50	431,74

Sumber: ¹BPS Kabupaten Lombok Barat, (2019)

³Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat, (2020)

Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Barat pada Tabel 2 dan dikonfirmasi dengan data dari Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat, bahwa sentra produksi tanaman tembakau ada di tiga kecamatan yaitu di kecamatan Gerung, kecamatan Lembar dan kecamatan Sekotong. Tiga kecamatan tersebut merupakan penghasil tembakau, atau bahan baku industri hasil tembakau.

Luas areal tanaman tembakau cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun. Luas areal tanaman dan produksi tembakau ditentukan oleh banyak faktor, diantaranya adalah kepastian lembaga yang berperan membeli produk tembakau, dan harga tembakau satu tahun sebelumnya. Berdasarkan informasi dari staf di Dinas Pertanian bidang Perkebunan Kabupaten Lombok Barat disebutkan bahwa luas areal dan produksi tembakau berfluktuasi dari tahun ke tahun, juga tergantung pada kebijakan pemerintah yang terkait dengan cukai tembakau.

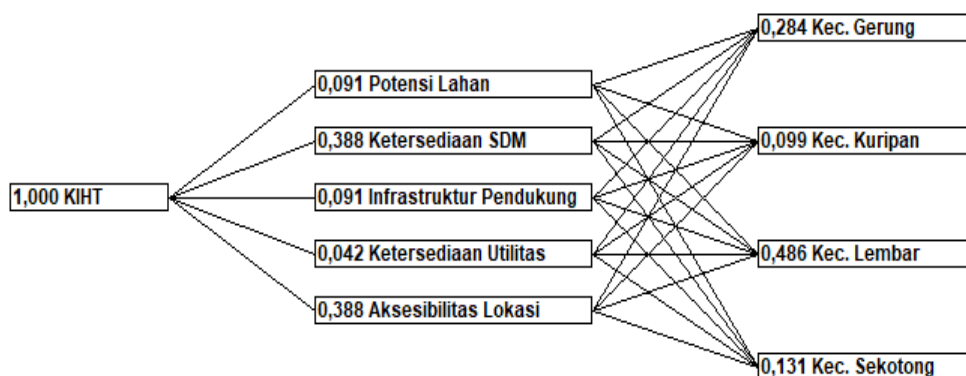
Dari hasil analisis data pada Tabel 2 diketahui bahwa produktivitas usahatani tembakau kasturi 1,523 ton per hektar pada tahun 2020 dan 1,456 ton pada tahun 2018. Atas dasar pertimbangan data sebagaimana diuraikan di atas, maka produksi tembakau diestimasi berkisar antara 427,85 ton/ha tembakau rajangan sampai dengan 805,90 ton/ha dengan nilai tengah 616,87 ton per hektar pada tahun 2018. Estimasi produksi pada tahun 2020 berkisar antara 219,15 ton sampai dengan 431,74 ton per hektar dengan nilai tengah 226,60 ton.

Fluktuasi luas areal tanaman tembakau mengindikasikan bahwa bisnis usahatani tembakau merupakan bisnis berisiko tinggi baik dilihat dari risiko pendapatan dan risiko harga. Harga tembakau yang berfluktuasi akan meningkatkan standar variasi harga, sehingga menimbulkan implikasi pada risiko pendapatan bagi petani yang mengusahakannya. Oleh karena itu dibutuhkan kelembagaan yang dapat menjamin pasar dan harga produk hasil tembakau yaitu dengan menyediakan unit produksi yang mengolah tembakau menjadi produk siap konsumsi seperti rokok, tembakau iris (mole), parfum, pestisida, dan lain-lainnya.

Selain luas areal tembakau kasturi terdapat luas areal tembakau virginia. Luas areal tembakau virginia 35 ha yang tersebar di Kecamatan Lingsar, Kecamatan Narmada, Kecamatan Kediri, Kecamatan Kuripan, dan Kecamatan Lembar. Jumlah produksi diprediksi 60,735 ton/ha diantaranya dijual dalam bentuk daun basah dan juga ada yang dijual dalam bentuk daun kering. Namun karena di luar objek kajian, maka pembahasannya tidak dilakukan secara detail.

Alternatif Lokasi SIHT

Setelah menganalisis potensi dan kelayakan pengembangan, maka untuk menentukan lokasi SIHT di Kabupaten Lombok Barat dilakukan dengan pendekatan Analisis Hierarki Proses (AHP). Ada lima kriteria yang dijadikan dasar untuk penentuan lokasi SIHT, yaitu: (1) Potensi lahan yang tersedia, (2) Ketersediaan SDM (Petani dan Buruh tani), (3) Ketersediaan infrastruktur pendukung, (4) Ketersediaan utilitas, dan (5) Aksesibilitas Lokasi. Selanjutnya mengenai bobot penilaian untuk masing-masing kriteria berbeda-beda sesuai dengan urgensi dari setiap kriteria, dimana penilaian urgensi/kepentingan masing-masing kriteria dilakukan oleh para pakar yang kompeten. Hasil analisis bobot kriteria disajikan pada Gambar 2.



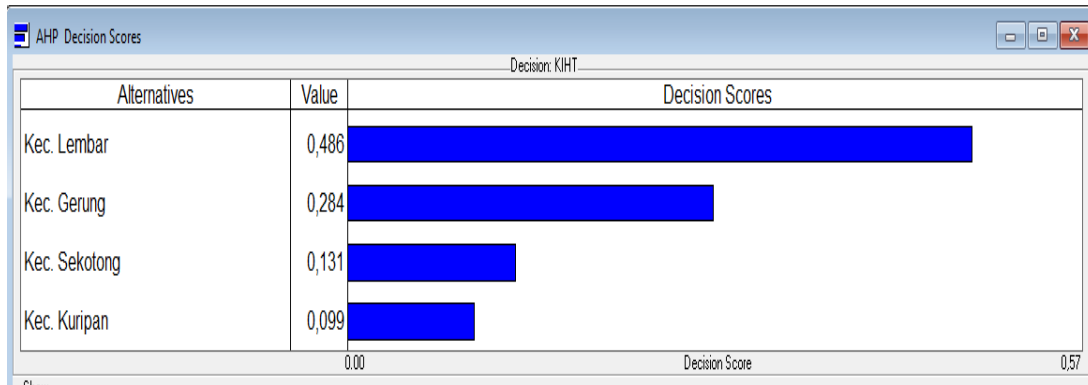
Gambar 2. Struktur AHP Pemilihan Lokasi SIHT di Kabupaten Lombok Barat

Hasil analisis menunjukkan bahwa dari lima kriteria yang dijadikan dasar pertimbangan dalam penentuan lokasi SIHT, kriteria yang memiliki bobot paling tinggi adalah “ketersediaan SDM” dan “aksesibilitas lokasi” dengan nilai eigen masing-masing sebesar 0,388 (38,8%). Kriteria kedua yang dijadikan pertimbangan dalam penentuan SIHT adalah “potensi lahan yang tersedia” dan “ketersediaan infrastruktur pendukung” dengan nilai eigen masing-masing sebesar 0,091 (9,1%). Kriteria terakhir adalah: “ketersediaan utilitas” dengan nilai eigen sebesar 0,042 (4,2%).

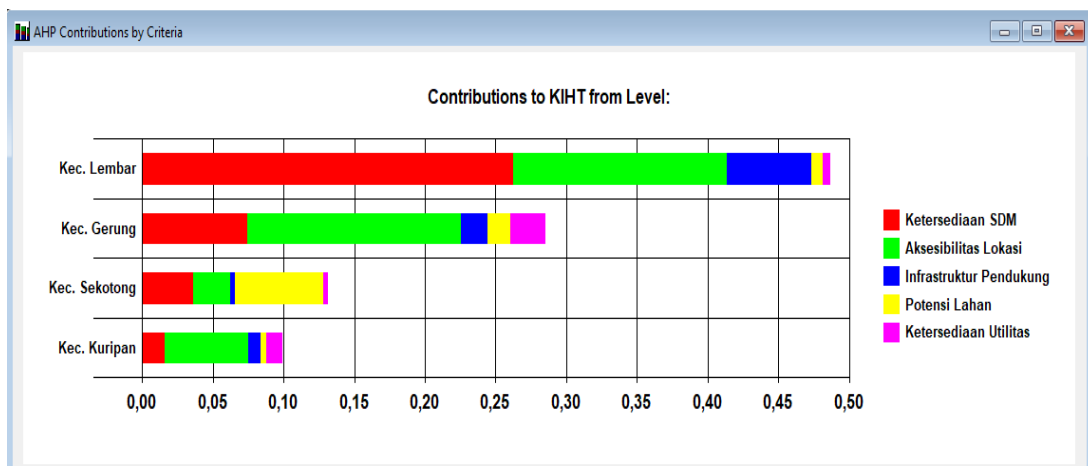
Berdasarkan pertimbangan kelima kriteria di atas, maka dengan analisis AHP dapat disusun urutan prioritas lokasi SIHT di Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan pertimbangan kelima kriteria secara keseluruhan, lokasi SIHT di Kabupaten Lombok Barat berturut-turut menurut skala prioritasnya adalah: Kecamatan Lembar, Gerung, Sekotong, dan Kecamatan Kuripan. Hasil analisis menunjukkan bahwa lokasi SIHT prioritas berbeda-beda menurut kriteria penilaian. Pada Gambar 3, 4, dan 5 disajikan hasil analisis urutan prioritas pada setiap kriteria serta kontribusi masing-masing kriteria dalam penentuan lokasi SIHT prioritas.

Lowest Level	Kec. Gerung	Kec. Kuripan	Kec. Lembar	Kec. Sekotong	Model
Aksesibilitas Lokasi	0,390	0,152	0,390	0,068	0,388
Ketersediaan SDM	0,191	0,042	0,675	0,092	0,388
Infrastruktur Pendukung	0,210	0,094	0,658	0,039	0,091
Ketersediaan Utilitas	0,565	0,262	0,118	0,055	0,042
Potensi Lahan	0,178	0,043	0,088	0,690	0,091
Results	0,284	0,099	0,486	0,131	

Gambar 3. Nilai Eigen Setiap Kriteria untuk Masing-masing Lokasi SIHT



Gambar 4. Hasil AHP Pemilihan Lokasi SIHT di Kabupaten Lombok Barat



Gambar 5. Kontribusi Masing-masing Kriteria pada Penentuan Lokasi SIHT

Skenario Pengelolaan SIHT

Dalam rangka pengelolaan SIHT di Kabupaten Lombok Barat, ditawarkan ada 4 (empat) skenario sebagai berikut:

Skenario ke-1

Jumlah perusahaan industri hasil tembakau yang terdaftar di wilayah Kabupaten Lombok Barat ada 7 (tujuh) unit. Keseluruhannya merupakan industri kecil berskala rumah tangga dengan jumlah serapan tenaga kerja kurang dari 10 orang dengan modal investasi kurang dari satu milyar rupiah. Lokasi usaha yang tersebar dan masuk kategori industri kecil, maka membutuhkan upaya sungguh-sungguh dalam menghimpun mereka di satu lokasi, bahkan sangat sulit untuk menghimpun mereka di satu tempat yang sama atau berdekatan dalam satu sentra industri hasil tembakau.

Oleh karena itu skenario ke-1 yang ditawarkan adalah melakukan penumbuhan dan pengembangan di lokasi usaha masing-masing yang dekat dengan tempat tinggal mereka. Pembinaan usaha industri hasil tembakau dilakukan melalui kelompok atau asosiasi industri hasil tembakau. Skenario ke-1 ini merupakan alternatif yang paling mungkin dalam jangka 1 – 3 tahun ke depan.

Skenario ke-2

Skenario ke-2 yaitu mempersiapkan generasi muda untuk merintis, menumbuhkan, dan mengembangkan usaha industri hasil tembakau. Skenario ini ditempuh melalui proses pendidikan dan pelatihan pengolahan industri hasil tembakau di lokasi yang direncanakan sebagai sentra kawasan industri hasil tembakau. Generasi muda pencari kerja atau minimal berpendidikan Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan dari wilayah sekitar rencana lokasi sentra / kawasan industri hasil tembakau diseleksi motivasi, kesungguhan, minat, dan bakat, serta keterampilan mereka.

Skenario ke-3

Pemerintah Daerah bekerjasama dengan perusahaan industri hasil tembakau yang memenuhi kriteria sebagai perusahaan kelas menengah. Kerjasama antara pemerintah daerah dengan pengusaha dapat dilakukan melalui kerjasama sistem sewa lokasi atau bagi untung sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mitra kerjasama pemerintah daerah adalah Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang telah memiliki reputasi baik dan kredibilitas dalam penyelenggaraan core business industri hasil tembakau.

Skenario ke-4

Skenario ke-4 adalah pemerintah daerah mendirikan badan usaha milik pemerintah daerah (BUMD) atau BUMD yang sudah ada bertugas mengelola sarana, prasarana, dan fasilitas yang ada di sentra industri hasil tembakau dengan imbalan BUMD menghasilkan deviden sebagai sumber pendapatan asli daerah. BUMD ini sebaiknya berbadan usaha persero yang mana sebagian sahamnya milik pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat.

Alternatif Badan Usaha Pengelola SIHT

Berdasarkan skenario model pengelolaan SIHT sebagaimana diuraikan di atas, maka alternatif Badan Usaha Pengelola SIHT di Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut:

1. Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dapat menjadi alternatif pengelola SIHT. Bagi desa yang memiliki potensi industri hasil tembakau didorong dan didampingi untuk menumbuhkan dan mengembangkan industri hasil tembakau di wilayah desa masing-masing.
2. Beberapa orang atau kepala rumahtangga yang memiliki usaha industri hasil tembakau dapat bergabung dalam suatu wadah koperasi atau asosiasi. Alternatif koperasi sebagai badan usaha tampaknya relatif sulit bagi para pengusaha yang sudah eksis untuk bergabung membentuk suatu koperasi. Koperasi berperan sebagai pengumpul bahan baku dan/atau distributor produk industri hasil tembakau. Peran koperasi adalah sebagai penghasil nilai tambah dari hulu (bahan baku) dan ke hilir dalam memasarkan produk industri hasil tembakau. Jika koperasi kurang mendapat respon dari para pengusaha industri hasil tembakau, mereka dapat mengembangkan Asosiasi Petani/Pengusaha Industri Hasil Tembakau sebagai wadah berorganisasi dalam membentuk dan mengembangkan rantai pasok tembakau dari hulu sampai ke hilir atau dari petani produsen sampai dengan konsumen tembakau.

3. Alternatif ke-tiga adalah persero yaitu beberapa badan atau perorangan bergabung membentuk persero dengan bisnis utama (*core business*) industri hasil tembakau. Alternatif ke-tiga dimungkinkan jika ada investor yang bersedia menanamkan modalnya pada bisnis industri hasil tembakau.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Terbatas pada ruang lingkup wilayah penelitian di Kabupaten Lombok Barat dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Secara spasial lokasi SIHT menurut skala prioritasnya di Kabupaten Lombok Barat berturut-turut adalah: Kecamatan Lembar, Gerung, Sekotong, dan Kuripan.
- 2) Ada 4 skenario pengelolaan SIHT, yaitu: pengembangan usaha di lokasi yang dekat dengan tempat tinggal mereka, mempersiapkan generasi muda untuk merintis dan mengembangkan usaha industri hasil tembakau, kerjasama Pemerintah Daerah dengan perusahaan industri hasil tembakau, dan mendirikan BUMD.
- 3) Alternatif Badan Usaha Pengelola SIHT adalah: Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), koperasi atau asosiasi, dan persero.

Saran

Berdasarkan hasil kajian dan analisis maka dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebelum pengembangan SIHT, direkomendasikan untuk dilakukan kajian lingkungan secara mendalam dan komprehensif berkaitan dengan pengembangan SIHT
2. Untuk memenuhi syarat kelayakan legalitas, maka perlu melengkapi izin lingkungan, izin lokasi, izin mendirikan bangunan (IMB), izin usaha, dan lain-lain.
3. Perlu pelatihan sumberdaya manusia (SDM) yang berperan sebagai pelaku usaha industri hasil tembakau.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahdan, Mappatoba., & Suparman. (2015). Analisis Penentuan Tanamantas Unggulan Sektor Pertanian di Kabupaten Tolitoli. *E-Jurnal Katalogis*, 3(10), 155-166.
- Hijrianto, D., (2022). Kerangka Acuan Kerja. Kajian Sentra Industri Hasil Tembakau Menuju Kawasan Industri Hasil Tembakau Kabupaten Lombok Barat. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Bappeda Lombok Barat.
- Mala, N.M., Muhibuddin, A., & Sifaunajah, A. (2018). Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Penggunaan Jenis Tanaman dengan Metode Analytic Hierarchy Process (AHP). *Saintekbu*, 10(1), 64-74. <http://dx.doi.org/10.32764/saintekbu.v10i1.163>
- Marimin. (2004). *Pengambilan Keputusan Kreteria Majemuk. Teknik dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- NTB Satu Data. (2021). Rekapitulasi Produksi, Luas Panen, dan Produktivitas [Tembakau Virginia di Provinsi NTB](https://data.ntbprov.go.id/). <https://data.ntbprov.go.id/>
- Rachmat, M. (2016). Pengembangan Ekonomi Tembakau Nasional: Kebijakan Negara Maju dan Pembelajaran Bagi Indonesia. Repositori Publikasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia. <http://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/4488>

- Saaty, T.L. (1993). Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin, Proses Hirarki Analitik untuk Pengambilan Keputusan Dalam Situasi yang Kompleks. Pustaka Binama Pressindo. <https://onsearch.id/Record/IOS7783.ai:slims-17184>.
- Sahri., Tajidan., Sukardi, Fahrudin., Ayu, C., Husni, S., & Zulkifli. (2022). The Financial and Economic Feasibility Analysis: a Value-Added Approach, *Kasturi Tobacco. Tec Empirical*, 17 (2), 17-33.
- Siregar, A. Z. (2016). Literasi Inventarisasi Hama dan Penyakit Tembakau Deli di Perkebunan Sumatera Utara. *Jurnal Pertanian Tropis*, 3 (3), 206-213. <https://talenta.usu.ac.id/jpt/article/view/2978>
- Sukardi, L., Ichsan, A.C., Febryano, I.G., Idris, M.H., Dipokusumo, B. (2022). Determination of the Type of Multy Purpose Tree Species (MPTS) Plant Featured in the Area of Community Forest. Central Lombok. *International Journal of Design & Nature and Ecodynamics*, 17 (4), 579-584.
- Sukardi, L., Tajidan, & Fahrudin. (2023). Spatial Mapping of Land Potential and Productivity of The Popular Kasturi Type of Tobacco. *International Journal of Management and Commerce Innovations*, 11 (1), 121-131.
- Suseno, A., & Sutrisno, S. (2019). Penerapan Analytical Hirarchi Process (AHP) Dalam Sistem Penilaian Kinerja Karyawan sebagai Acuan untuk Promosi Jabatan Di PT. XYZ. *Jurnal Media Teknik dan Sistem Industri*, 3(2), 73-80. <https://doi.org/10.35194/jmtsi.v3i2.543>.
- Syaputra, A. (2021). Kombinasi metode AHP dan TOPSIS dalam Pemilihan Bibit Sayuran Berdasarkan Kondisi Tanah dan Syarat Tumbuh Tanaman. *Jurnal Ilmiah Informatika*, 6(1): 11-19. <https://doi.org/10.35316/jimi.v6i1.1232>.
- Triono, D. (2017). Analisis Dampak Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Negara dan Produksi Tembakau Domestik. *Jurnal Pajak Indonesia*, 1 (1), 124-129. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/view/177>.
- Purba, S. A. B., Hartianti, A., & Tuningrat, I. A. M. (2015). Pemilihan Prioritas Tanaman Agrowisata Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) di Desa Candikuning II, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan. *Jurnal Rekayasa dan Manajemen Agroindustri*, 3(1), 82-92.
- Wati, M., Maulana, A., & Widians, J. A. (2020). Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Tumbuhan Berkhasiat Obat Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Processweighted Product. *ILKOM Jurnal Ilmiah*, 12(3), 219-227. <http://dx.doi.org/10.33096/ilkom.v12i3.671.219-227>